

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penduduk dibagi menjadi penduduk usia produktif yang berusia 15 – 65 tahun dan penduduk usia non produktif yang berusia kurang dari 15 tahun dan lebih dari 65 tahun. Penduduk usia produktif dibagi menjadi bukan angkatan kerja (yang terdiri dari ibu rumah tangga, pelajar serta mahasiswa) dan angkatan kerja (yang terdiri dari penganggur dan pekerja). Dari beberapa kelompok penduduk tersebut, angkatan kerja merupakan kelompok penduduk yang akan mengisi kesempatan kerja, sehingga angkatan kerja di suatu daerah dapat mencerminkan jumlah penduduk yang memerlukan kesempatan kerja.

Menurut Sigit, penduduk yang bertambah dengan cepat akan berpengaruh pada jumlah angkatan kerja¹. Berikut ini adalah tabel penduduk dan angkatan kerja Provinsi D.I. Yogyakarta.

Tabel I.1 Penduduk dan Angkatan Kerja Provinsi D.I. Yogyakarta

Tahun	Penduduk (juta jiwa)	Kenaikan Penduduk	Angkatan Kerja (juta jiwa)	Kenaikan Angkatan Kerja
1971	2.49		1.02	
1980	2.75	10%	1.24	22%
1990	2.91	6%	1.52	23%
2000	3.12	7%	1.7	12%
2010	3.45	11%	1.88	11%
Jumlah	14.72	34%	7.36	67%
Rata-rata	2.944	9%	1.472	17%

Sumber: BPS R.I., diolah

¹*Indikator Kesejahteraan Rakyat 2010*, (Yogyakarta: BPS Provinsi D.I. Yogyakarta), hal.30.

Data-data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 1971-1980 terjadi kenaikan jumlah penduduk sebesar 10 persen diiringi oleh kenaikan jumlah angkatan kerja sebesar 22 persen. Selanjutnya, pada saat jumlah penduduk mengalami kenaikan terendah sebesar 6 persen dari tahun 1980-1990, angkatan kerja mengalami kenaikan sebesar 23 persen, yang merupakan kenaikan jumlah angkatan kerja tertinggi. Sedangkan, pada saat jumlah penduduk mengalami kenaikan tertinggi yaitu 11 persen, angkatan kerja hanya naik sebesar 11 persen. Selain itu, data-data tersebut juga menunjukkan bahwa sejak tahun 1971 sampai dengan tahun 2010, rata-rata kenaikan jumlah angkatan kerja lebih besar dari rata-rata kenaikan jumlah penduduk, yaitu masing-masing sebesar 17 persen dan 9 persen.

Berdasarkan data-data di atas, dapat disimpulkan bahwa Provinsi Daerah Istimewa (D.I.) Yogyakarta terus mengalami kenaikan jumlah penduduk yang diiringi dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, dengan rata-rata sebesar 17 persen. Jumlah penduduk dan angkatan kerja yang semakin bertambah besar di Provinsi D.I. Yogyakarta perlu diatasi dengan meningkatkan kesempatan kerja agar angkatan kerja yang ada dapat terserap, dan tidak menjadi masalah. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Simanjuntak bahwa:

Penduduk dan angkatan kerja yang besar tidak perlu menjadi masalah bila daya dukung ekonomi yang efektif di negara itu cukup kuat untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan masyarakat termasuk penyediaan kesempatan kerja².

²Aripin Ahmad, Syahrifin Abdullah, Ambya, *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja Di Lampung*, Buletin Ilmiah Lampung Vol. 1 No 6, hal. 27.

Selain angkatan kerja yang selalu mengalami kenaikan, tingkat pengangguran juga menjadi salah satu alasan, perlunya pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta untuk meningkatkan kesempatan kerja. Tingkat pengangguran yang tinggi menunjukkan minimnya kesempatan kerja yang tercipta. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Sri dan Wiyono bahwa:

Tingginya angka pengangguran menjadi indikator yang membahayakan, karena makin tinggi angka pengangguran, makin banyak angkatan kerja yang tidak dapat bekerja, sebaliknya tingkat pengangguran yang rendah menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam menyediakan pekerjaan bagi penduduknya³.

Berikut ini adalah tabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi D.I. Yogyakarta.

**Tabel 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi D.I. Yogyakarta
(2000-2011)**

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) %
2001	5,18
2002	5,21
2003	5,62
2004	6,26
2005	7,59
2006	6,31
2007	6,1
2008	5,38
2009	6
2010	5,69
2011	5,47

Sumber: BPS R.I.

³Sri Harijati Hatmadji dan Nur Hadi Wiyono, *Karakteristik Penganggur dan Prospek Penawaran Tenaga Kerja di Indonesia Vol. II No.2*, hal. 418.

Berdasarkan data tersebut, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi D.I. Yogyakarta selama beberapa tahun menunjukkan pola yang berfluktuasi dengan kecenderungan semakin menurun. Sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 TPT terus mengalami kenaikan, dengan TPT tertinggi yaitu pada tahun 2005 sebesar 7,59 persen, setelah itu TPT menurun sampai dengan tahun 2008, lalu naik kembali di tahun 2009 dan mengalami penurunan berturut-turut di tahun 2010 dan 2011 yaitu masing –masing sebesar 5, 69 persen dan 5, 47 persen. Maka dapat disimpulkan bahwa, sejak tahun 2009 TPT mengalami penurunan, namun dengan penurunan yang masih sangat kecil yaitu 0,22 persen sampai dengan 1 persen, hal ini menunjukkan kenaikan kesempatan kerja yang masih sangat kecil.

Untuk meningkatkan kesempatan kerja dapat dilakukan dengan membelanjakan pengeluaran dari para pelaku ekonomi yang terdiri dari pemerintah, swasta, masyarakat dalam negeri dan luar negeri. Pengeluaran tersebut akan meningkatkan permintaan agregat dan mengakibatkan kenaikan kesempatan kerja. Hal tersebut, sesuai dengan pendapat Keynes yang dijelaskan oleh Carunia sebagai berikut:

Upaya untuk mengatasi pengangguran tidak dapat diserahkan kepada mekanisme *self-correcting power* seperti yang disarankan Pigou (1936). Oleh karena itu pemerintah harus melakukan inisiatif dalam mengatasi masalah ini. Kebijakan ekonomi yang dimaksud adalah kebijakan untuk mengatasi defisiensi dalam permintaan agregat (*Aggregate demand*). Secara lebih spesifik pemerintah harus meningkatkan pengeluaran konsumen, pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan mengurangi impor⁴.

Berdasarkan kutipan di atas, untuk mengatasi pengangguran, perlu meningkatkan pengeluaran yang terdiri dari pengeluaran konsumsi masyarakat, pengeluaran

⁴Carunia, *Kesempatan Kerja di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan XII (2), hal. 63.

investasi, pengeluaran pemerintah, dan pengeluaran ekspor netto. Pengeluaran-pengeluaran tersebut merupakan komponen permintaan agregat yang perubahannya akan dapat memengaruhi kesempatan kerja. Jadi, dapat dikatakan bahwa pengeluaran-pengeluaran tersebut merupakan faktor-faktor yang memengaruhi kesempatan kerja.

Faktor pertama adalah pengeluaran investasi. Investasi dapat dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Pengeluaran investasi yang dimaksud sebagai komponen permintaan agregat adalah pengeluaran investasi dari pelaku ekonomi swasta, yang dapat diukur melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Meningkatnya PMDN dan PMA akan memungkinkan tercipta proyek usaha baru. PMDN diharapkan mampu menciptakan proyek-proyek baru dengan kepemilikan dalam negeri, sedangkan PMA, diharapkan mampu mendukung sektor-sektor yang belum mampu sepenuhnya dilaksanakan oleh swasta dalam negeri.

**Tabel 1.3 Realisasi Investasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
(2005-2011)**

Tahun	PMA		PMDN	
	Proyek	Nilai (US\$ Juta)	Proyek	Nilai Rp. Miliar
2005	7	17.34	2	28.01360408
2006	11	48.80	1	20
2007	3	0.84	0	33.0755
2008	6	16.64	0	0
2009	5	8.09	2	32.85
2010	20	4,9	3	10
2011	22	2,4	7	1,6

Sumber: Badan Koordinasi & Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia

Berdasarkan data di atas, realisasi PMA terjadi setiap tahun, sedangkan tidak demikian dengan realisasi PMDN. Pada tahun 2008 Nilai realisasi PMDN adalah 0 (nol). Hal tersebut menunjukkan ketimpangan antara realisasi PMA dan PMDN di provinsi D.I. Yogyakarta, serta kondisi realisasi investasi yang berfluktuasi baik untuk realisasi PMA maupun PMDN di Provinsi D.I. Yogyakarta dengan kecenderungan menurun. Hal ini harus menjadi fokus perhatian pemerintah daerah Provinsi D.I. Yogyakarta untuk meningkatkan nilai realisasi investasi di Provinsi D.I. Yogyakarta.

Faktor selanjutnya adalah pengeluaran dari pelaku ekonomi pemerintah. Peningkatan pengeluaran pemerintah diharapkan mampu memberikan stimulus bagi perekonomian sehingga output perekonomian meningkat. Dengan adanya kenaikan output perekonomian, maka peluang terciptanya kesempatan kerja baru juga akan terbuka. Selanjutnya nilai realisasi pengeluaran pemerintah daerah Provinsi D.I. Yogyakarta ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 1.4 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (2005-2011)

Tahun	Pengeluaran Pemerintah (Dalam Ribuan Rp)	Prosentase Kenaikan
2005	676,198,526.00	
2006	850,630,248.00	26%
2007	977,994,235.00	15%
2008	1,453,286,282.00	49%
2009	1,327,487,848.00	-9%
2010	1,394,446,100.00	5%
2011	1,562,268,738	12%

Sumber: BPS R.I.

Berdasarkan data di atas, realisasi pengeluaran pemerintah daerah D.I. Yogyakarta dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 cenderung mengalami kenaikan, dan menurun dari tahun 2008 ke tahun 2009, kemudian nilai realisasi pengeluaran pemerintah naik kembali berturut-turut dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011. Kenaikan terbesar terjadi dari tahun 2007-2008 yaitu sebesar 45 persen, dan setelah itu terjadi minus yang menunjukkan penurunan terbesar dari tahun 2008-2009. Maka, pemerintah daerah Provinsi D.I. Yogyakarta harus lebih mengoptimalkan realisasi pengeluaran pemerintah daerahnya agar selalu mengalami perbaikan dari tahun ke tahun guna melaksanakan pembangunan daerah termasuk peningkatan kesempatan kerja.

Pengeluaran pemerintah maupun investasi swasta memerlukan realisasi atau penyerapan agar dana yang telah dikumpulkan tidak sia-sia dan dapat dipakai untuk mendorong pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur dan dunia usaha, sehingga memberikan *multiplier effect* yang tinggi.

Upaya untuk meningkatkan kesempatan kerja juga dapat dilakukan melalui peningkatan ekspor. Ekspor mencerminkan adanya permintaan dari masyarakat luar negeri terhadap barang dan jasa produksi dalam negeri. Nilai ekspor barang asal D.I. Yogyakarta yang dikirim melalui beberapa pelabuhan di Indonesia pada bulan Juni 2013 sebesar US\$ 22.841.835. Angka ini mengalami penurunan sebesar 6,18 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang nilainya sebesar US\$ 24.345.842, dan mengalami peningkatan sebesar 6,88 persen dibandingkan kondisi setahun yang lalu (Juni 2012) yang tercatat senilai US \$ 21.371.433. Sedangkan impor barang D.I Yogyakarta pada bulan Juni 2013 melalui

pelabuhan udara Adi Sutjipto senilai US\$.121.785, mengalami peningkatan 477,86 persen dibandingkan bulan Mei 2013 dan naik 27,35 persen dibandingkan setahun yang lalu⁵. Data-data tersebut menunjukkan bahwa nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, namun nilai ekspor mengalami penurunan sedangkan nilai impor kenaikan, dengan kenaikan yang lebih besar dari penurunan nilai ekspor.

Ekspor diharapkan lebih besar dari impor, agar efek dari peningkatan tersebut dapat dirasakan, untuk menambah kesempatan kerja. Semakin banyak masyarakat luar negeri melakukan permintaan terhadap barang dan jasa buatan dalam negeri, maka akan semakin banyak perusahaan yang melakukan ekspor barang dan jasa tersebut ke luar negeri, sehingga akan memberikan efek terhadap meningkatnya kegiatan produksi yang dapat meningkatkan kesempatan kerja.

Faktor lain yang memengaruhi kesempatan kerja adalah pengeluaran konsumsi masyarakat yang merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Pada bulan Februari 2013 Indeks Tendensi Konsumen DIY pada Triwulan IV-2012 sebesar 109,21 lebih rendah dari triwulan sebelumnya dengan nilai indeks 112,90. Lebih rendahnya ITK DIY terutama didorong oleh penurunan konsumsi makanan dan bukan makanan dengan nilai indeks 100,46⁶. Penurunan konsumsi masyarakat menunjukkan semakin sedikit barang yang dikonsumsi masyarakat, sehingga terjadi kelebihan stok barang pada sisi produsen, yang dapat menyebabkan pengurangan tenaga kerja. Maka, untuk meningkatkan kesempatan kerja, konsumsi masyarakat perlu ditingkatkan. Semakin banyak barang dan jasa yang

⁵ <http://yogyakarta.bps.go.id/>, diakses 12 Agustus 2013.

⁶ <http://krjogja.com/read/160907/ups-tingkat-konsumsi-di-diy-turun.kr>, diakses 12 Agustus 2013.

dikonsumsi, semakin banyak barang dan jasa yang terjual, dengan demikian produsen akan semakin banyak memproduksi barang dan jasa, karena produsen melihat adanya kenaikan permintaan terhadap barang dan jasa (agregat), hal ini membuat produsen membutuhkan tenaga kerja tambahan, sehingga kesempatan kerja pun bertambah.

Berdasarkan beberapa faktor dari kesempatan kerja tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Pengaruh Investasi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Kesempatan Kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, dapat diidentifikasi masalah antara lain sebagai berikut:

- 1) Naik turunnya nilai realisasi investasi mempengaruhi kesempatan kerja.
- 2) Naik turunnya nilai realisasi pengeluaran pemerintah mempengaruhi kesempatan kerja.
- 3) Penurunan konsumsi masyarakat mempengaruhi kesempatan kerja.
- 4) Penurunan ekspor dan kenaikan impor mempengaruhi kesempatan kerja.

C. Pembatasan Masalah

Mengingat banyak dan kompleksnya permasalahan yang timbul dan hal ini tidak memungkinkan bagi peneliti untuk membahas semua masalah di dalam

penelitian ini, maka peneliti membatasi penelitian ini pada masalah "Pengaruh Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kesempatan Kerja Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan triwulan Tahun 2001 Sampai Dengan Tahun 2011".

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Apakah terdapat pengaruh Investasi terhadap Kesempatan Kerja?
- 2) Apakah terdapat pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Kesempatan Kerja?
- 3) Apakah terdapat pengaruh Investasi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Kesempatan Kerja?

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoretis
 - a. Mengembangkan pengetahuan mengenai investasi, pengeluaran pemerintah, dan kesempatan kerja.
 - b. Mengembangkan wawasan mengenai investasi, pengeluaran pemerintah, dan kesempatan kerja.
2. Kegunaan secara praktis

- a. Sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi terhadap kebijakan investasi dan pengeluaran pemerintah dan kaitannya dengan kesempatan kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Sebagai bahan untuk memberi informasi, acuan, masukan, serta referensi bagi penelitian selanjutnya.